

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Anwar, Chairul. *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional: Dilengkapi Dengan Analisis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ZEE di Asia-Pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Arsana. I Made Andi. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Black, Henry C. *Black's Law Dictionary*. 5th ed. St. Paul: West Publishing Co, 1979.
- Diantha, I Made Pasek. *Zona Ekonomi Eksklusif*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Djalal, Hasjim. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Fachrudin, Achmad dan Solihin, Akhmad. *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2018.
- Heryandi. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 2018.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014.
- Prijanto, Heru. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayu Media Publishing, 2020.
- Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Presscot, Victor dan Schofield, Clive. *The Maritime Political Boundaries of the World*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005.
- Roisah, Kholis. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Malang; Setara Press, 2015.
- Sefrani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Susmoro, H., Nugroho, Haris D, dan Handwiono Y. *Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI-Negara Tetangga (Peran Pushidrosal dalam Mendukung Diplomasi Maritim Indonesia)*. Jakarta: PUSHIDROSAL, 2019.
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pratono. *Hukum Internasional Kontenporer*. Bandung: Refika Ditama, 2006.

SKRIPSI

- Rahma, Sinthia. *Perlindungan Hukum Terhadap Perompakan Kapal Di Somalia Berdasarkan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 (Studi Kasus Kapal MV. Sinar Kudus 2011)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Adlini, Mirza N. Dinda, Hanifa A. Yulinda, Sarah. Chotimah, Octavia. Merliyana, Sauda J. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. EDUMASPUL Vol. 6 No, 1 (Desember, 2021).
- Adnyana, Kadek R. T. *Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (September, 2022).

- Chomariyah, Prinsip Equitable Dalam Penetapan Maritime Boundary Delimitation Antara Indonesia Dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016. Seminar Nasional Kelautan XII. (Juli, 2017).
- Darnela, Lindra. Upaya Indonesia dalam Mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Hukum Laut Internasional. *Sosio-Regilia* Vol. 10 No. 2 (Mei, 2012).
- Disemadi, Hari S. Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review* 24 No. 2 (Desember, 2022).
- Enriquez, Arnold. The Philippines-Indonesia Maritime Border Agreement: Strengthening Relations towards Regional Stability in Southeast Asia, Issue 43 (2021).
- Kartika, Shanti Dwi. Maritime Security From The Aspects of Regulation and Law Enforcement. *Jurnal Negara Hukum* Vol. 5 No.2 (November, 2014).
- Lestari, Maria Maya. Arti Penting Delimitasi Perairan Pedalaman Setiap Pulau di Indonesia. *Jurnal Legalitas* (Agustus, 2017).
- Purwanti, Evi. Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan. *Balobe Law Journal* Vol 1, No. 2 (Oktober, 2021).
- _____. Dekonstruksi Equitable Principle Dalam Hukum Laut Internasional. *Tanjungpura Law Journal* Vol. 1 Issue 1 (Januari, 2017).
- Rombot, Berliani. Senewe, Emma V. T. Paseki, Dicky J. Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional. (September, 2023)
- Songko, Gerald E. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum* Vol. IV No. 4 (April, 2016).
- Windradi, Fitri dan Wahyuni Niniek. Konsep Pengaturan dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan RI Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Transparansi Hukum*. (Januari, 2020)
- Yulianti, Ni Putu Rai Dan Pardani, Ni Kadek Citra. Cooperation Between Indonesia And The Philippines In Maritime Affairs Related To Eez (Exclusive Economic Zone) Based On The United Nations Convention On

The Law Of The Sea Of 1982 or UNCLOS. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 8 No. 2 (Agustus, 2022).

PERATURAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982)

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

MEDIA ONLINE

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Negara,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negara>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Adil,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Negara>

Harry S Truman, “Proclamation No. 2667, Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf”, 28 Sept 1945.
<https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2667-policy-the-united-states-with-%20respect-the-natural-resources-the-subsoil>

VOA Indonesia, Kerjasama Indonesia dan Filipina untuk Tumpas Ancaman ISIS. (09 Januari 2018). <https://www.voaindonesia.com/a/kerjasama-indonesia-filipina-tumpas-ancaman-isis-/4199188.html>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pembukaan Rute Bitung- Davao-General Santos Dukung Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia. (30 April 2017).
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2031/pembukaan-rute-bitung-davao-general-santos-%20dukung-pembangunan-kelautan-dan-kemaritiman-indonesia>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia dan Filipina Perkuat Kerja Sama Kelautan Melalui Pertemuan Ke 11 Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC). (26 Mei 2021).
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2508/berita/indonesia-%20dan-filipina-perkuat-kerja-sama-kelautan-melalui-pertemuan-ke-11-joint-permanent-working-%20group-on-maritime-and-ocean-concerns-jpwg-moc>